

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan yang penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Informasi laba dalam laporan keuangan dianggap menjadi laporan paling penting karena informasi laba dipandang sebagai representasi kinerja manajemen perusahaan pada periode tertentu. Untuk itu, informasi dalam laporan keuangan perusahaan sangat di perlukan oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan yang kurang memiliki wewenang dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan (Br Verina, 2017).

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*).

Teori keagenan merupakan landasan utama yang mawadahi aktivitas bisnis perusahaan saat ini, dimana hubungan keagenan ini mengatur kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik maupun investor (*principal*). Dalam Teori ini menitik beratkan pada aliran informasi yang terperinci dari agen kepada principal. Namun, realisasi dilapangan tidaklah sederhana, hal ini merujuk pada kepentingan antara dua pihak yang tidak selaras. Perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal menjadi pemicu konflik yang biasa disebut sebagai masalah keagenan (Sukianasih & Tenaya, 2016).

Meningkatnya kompleksitas aktivitas usaha juga mengakibatkan semakin kompleksnya resiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan sehingga mempertegas pentingnya peran manajemen resiko yang dapat diandalkan. Resiko tersebut perlu untuk dikendalikan agar perusahaan mampu mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko disuatu organisasi perusahaan tidak terlepas dari praktik *good corporate governance* (GCG).

Teori keagenan merupakan landasan utama yang mawadahi aktivitas bisnis perusahaan saat ini, dimana hubungan keagenan ini mengatur kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik maupun investor (*principal*). Dalam Teori ini menitik beratkan pada aliran informasi yang terperinci dari agen kepada principal. Namun, realisasi dilapangan tidaklah sederhana, hal ini merujuk pada kepentingan antara dua pihak yang tidak selaras. Perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal menjadi pemicu konflik yang biasa disebut sebagai masalah keagenan (Sukianasih & Tenaya, 2016).

Good corporate governance (GCG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar (Ratnawati, 2012). *Good Corporate governance* menjadi

salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dimana perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang mana berawal dari konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik *principal* dan manajer sebagai agen, terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan tersebut.

Praktik manajemen laba (*earning management*) sudah banyak terjadi dalam beberapa diantaranya, kasus maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dikenai sanksi oleh lembaga keuangan pemerintahan dan non pemerintahan. Pasalnya, ada kejanggalan yang ditemukan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia. Laporan keuangan Garuda Indonesia ditahun buku 2018, dalam laporan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu setara Rp 11,33 miliar (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2108 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. PT Mahata Aero Teknologi mencatat utang sebesar USD 239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. (economy.okezone.com , Jum'at 28 Juni 2019 17:47 WIB Jurnalis – Giri Hartomo).

Sistem struktural kebijakan kelembagaan, aturan pelaksanaan dan kontrol bisnis yang membentuk suatu kerangka kerja di mana perusahaan dikelola dan beroperasi merupakan tata kelola perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadi praktik manajemen laba adanya dengan menerapkan tata kelola perusahaan (*good corporate govarmance*) (Imani, 2016).

Penelitian Ujiyantho & Pramuka (2007) dalam Restuningdiah (2011), *good corporate govermance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan *agency cost*. *Good Corporate govermance* adalah konsep yang mendasar teori keagenan dan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat di minimalisir dengan menerapkan *good corporate govarmance*. Mekanisme *good corporate govermance* dapat mengawasi manajemen dan pengambilan keputusan, sehingga memudahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menurut Handajani dkk (2006) dalam Restuningdiah (2011).

Manajemen laba adalah upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi khususnya laba (*earnings*) demi kepentingan pribadi dan/atau perusahaan. Manajemen laba tidak sepenuhnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang negatif karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Meskipun secara prinsip tidak semua praktik manajemen laba menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, namun adanya tindakan manajemen laba dapat mengikis kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* terhadap laporan keuangan. Manajemen laba juga merupakan hal yang merugikan investor karena mereka

tidak akan mendapat informasi yang sesungguhnya mengenai posisi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan penerapan prinsip good corporate govarmance, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan No.: Kep-315/BEJ/06-2000 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan No.: Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai pembentukan komisaris independen, komite audit dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Hal ini didukung oleh Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks manajemen resiko, Dewan Komisaris berada dikedudukan tertinggi sebagai pengawas pelaksanaan manajemen resiko perusahaan di Indonesia. Sedangkan tanggung jawab atas berjalannya penerapan pelaksanaan manajemen resiko yang diberikan secara formal wewenangnyanya kepada Dewan Direksi. Tetapi keduanya juga bertanggung jawab untuk menetapkan jenis resiko mana yang harus dikelola oleh satuan kerja manajemen resiko, mengingat semakin kompleksitas bisnis yang dijalankan (Hardanto ,2006 dalam Kusuma (2012).

Dewan Komisaris tidak berpengaruh langsung terhadap manajemen laba (Taco & Ilat, 2016 : 881). Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Andayani, 2010). Keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba (Restuningdiah, 2011). Dewan komisaris independen sendiri bukanlah yang berpengaruh terhadap manajemen laba, dewan komisaris yang rajin berhubungan dengan rendahnya manajemen laba sedangkan dewan komisaris yang memiliki banyak pekerjaan lain berhubungan dengan manajemen laba (Sarkar, *et al.*, 2006 dalam

Restuningdiah, 2011). Jumlah anggota atau ukuran dewan komisaris yang ideal ditentukan melalui jenis industri entitas yang bersangkutan, karena nantinya akan melibatkan kompetensi yang wajib dimiliki oleh keseluruhan dewan komisaris (Prastuti, 2013 dalam Sukaniasih & Tenaya, 2106).

Dewan komisaris juga dapat mendelegasikan tanggungjawabnya kepada komite audit untuk lebih mengefisiensikan pekerjaannya. Komite audit memiliki peran dalam melakukan pengawasan atas manajemen laba pada pihak manajemen (agent) agar tidak melakukan hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri sehingga akan merugikan pemilik perusahaan (*principle*). Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit (Pamudji & Trihartati, 2010).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan dengan keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM LK No.IX.I.5. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memiliki Komite Audit.

Komite audit merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dengan hal ini terbukti dengan adanya syarat bahwa perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau perusahaan publik haruslah memiliki Komite Audit. Persyaratan ini bersifat *mandatory* bagi semua perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Ertanto, 2017). Hal tersebut menyebabkan komite audit belum melaksanakan tugas dan

tanggung jawab secara maksimal sehingga fungsi dan perannya tidak efektif (Pamudji & Trihartati, 2010).

Bapepam (2004) menghendaki bahwa seorang komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Restuningdiah (2011) menyatakan bahwa semakin ahli komite audit tersebut dalam masalah keuangan, maka semakin efektif pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan untuk menghalangi terjadinya manajemen laba.

Bapepam (2004) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran. Frekuensi pertemuan yang rutin antar anggota komite audit diharapkan dapat mengurangi tingkat manajemen laba, pertemuan tersebut merupakan suatu kesempatan bagi pihak manajemen dan auditor eksternal untuk menyampaikan masalah-masalah yang mereka temukan sekaligus sebuah kesempatan bagi anggota komite audit untuk membahas dan mencari solusi dari masalah-masalah tersebut (Pamudji & Trihartati, 2010). Restuningdiah (2011) menyatakan bahwa semakin ahli komite audit tersebut dalam masalah keuangan, maka semakin efektif pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan untuk menghalangi terjadinya manajemen laba.

Komite audit perusahaan juga dapat di bantu dengan dibentuknya internal audit sebagai pelengkap keberadaan *internal governance framework* (Davidson, et al., 2005 dalam Restuningdiah, 2011). Keberadaan fungsi internal audit sebagai jasa konsultasi, yang dapat dikembangkan terhadap efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses *governance*. Internal audit

dilakukan oleh perangkat pengawas internal yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, kualitas Laporan Keuangan yang baik ditentukan oleh baiknya sistem internal audit perusahaan.

Penelitian Maghriby (2012), menyatakan bahwa fungsi internal audit berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Memastikan keandalan dan menintegrasikan laporan keuangan perusahaan yang menjadi titik kelemahan dalam fungsi internal audit, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang internal audit untuk lebih memastikan keandalan informasi laporan keuangan perusahaan : (1) Auditor internal secara periodik menilai keandalan informasi dan integritas organisasi; (2) Auditor internal merekomendasikan peningkatan pengendalian dan pengamanan aset; (3) Auditor internal harus memiliki akses yang baik terhadap sumber daya audit yang kompeten untuk mengevaluasi keandalan dan integritas informasi beserta eksposur resiko-resikonya; (4) Menganalisis kejadian dan kegiatan atas resiko-resikonya yang mungkin terjadi terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan; (5) Menganalisis akun-akun atas resiko-resikonya yang mungkin terjadi terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan; (6) memeriksa pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang memiliki resiko yang telah dianalisis sebelumnya.

Kunci penting demi berjalannya sistem manajemen resiko perusahaan efektif terdapat pada aspek pengawasan. Penelitian Ratnawati (2012), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap RMC.

Risk management committee (RMC) merupakan mekanisme pengawasan resiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, et al, 2009 dalam

Restuningdiah 2011). Keberadaan *risk management committee* dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Subramaniam, 2009) dalam (Setiawan, 2016). Komite manajemen risiko (RMC) adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi. *Risk management committee* bertanggungjawab kepada dewan komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004) dalam (Setiawan, 2016).

Frekuensi dari rapat dewan beserta komite manajemen risiko menjadikan sebuah dewan lebih aktif (Setyarini, 2011) dalam (Setiawan, 2016). Frekuensi rapat komite manajemen risiko merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari komite manajemen risiko itu sendiri. Pada frekuensi rapat komite manajemen risiko adalah tepat mengingat frekuensi rapat komite manajemen risiko secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara dewan komisaris maupun direksi dalam fungsinya sebagai *internal control* (seperti *risk management committee*) dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya.

Komite manajemen resiko (Risk Management Committee/RMC) di Indonesia sendiri berkembang mulai meningkat. Kebutuhan untuk melaksanakan pengelola usaha berdasarkan praktek-praktek terbaik dengan berdasarkan prinsip TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsible, Independent, Fairness*) (Ratnawati, 2012). Keberadaan RMC dalam perusahaan salah satu wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena keberadaan RMC akan mengungkapkan informasi mengenai resiko dan manajemen resiko perusahaan serta pengawasan yang dilakukan oleh RMC.

Dengan adanya internal *governance* diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan yang terkait dengan perataan laba.

Berdasarkan latar belakang yang di telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil judul : **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, INTERNAL AUDIT DAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE TERHADAP MANAJEMEN LABA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dibahas di latar belakang dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah Internal Audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah Komite Manajemen Resiko (*Risk Management Committee*) berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
5. Apakah dewan komisaris independen, komite audit, audit internal, dan Komite Manajemen Resiko (*Risk Management Committee*) berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris, komite audit, internal audit dan komite manajemen resiko/RMC terhadap manajemen laba di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh internal audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite manajemen resiko (*Risk Management Committee*) terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, internal audit dan RMC terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian dan referensi untuk mengembangkan wawasan dan teori mengenai praktik manajemen laba yang ada di perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien serta mampu meminimalisir praktik manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai agency teory dan menegenai tata kelola perusahaan yang baik dengan menilai efektifitas dari internal govermance dan internal audit.